

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU BUKU

BPHN, *Analisa dan Evaluasi tentang Masalah Calo dalam Jual Beli Tanah*, Jakarta: 1993.

Fuady, Munir, *Teori Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana Prenada Media : Edisi Pertama, 2013

Ginting, Darwin, *Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Gunanegara, *Tanah dan Negara, dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2008.

Hambra, *Permasalahan Pertanahan di BUMN*, pelatihan “aspek hukum pengelolaan, pengendalian asset tanah BUMN dan penyelesaian masalahnya”, Bandung, 13 Agustus 2009.

Hamzah, Andi, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, 1997.

_____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007.

Hartanto, Andy, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak atas Tanahnya*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014

Hatta, Mohammad, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Jogjakarta: Media Abadi, 2005.

Herman Hidayat, *Upaya Pengelolaan, Pengamanan dan Pengawasan Tanah Milik BUMN*, seminar tentang pengawasan dan penyelesaian masalah asset tanah oleh PT IP” Bandung, 21 Desember 2012.

Hutagalung, Arie Sukanti, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi* (suatu kumpulan karangan), Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2003.

_____, Arie Sukanti, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.

- _____ dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Iskandar, Mudakir, *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan, cetakan pertama*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, April 2014.
- Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, Edisi Pertama, Jakarta: Graha Ilmu, 2011
- Kamilah, Anita *Aspek aspek Hukum Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) Membangun tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: Keni Media, , 2012.
- Kolopaking, Anita D.A., *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, , Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Jogjakarta: Liberty, 2009.
- _____, *Bab Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mh. Natsir T. Radja, *Asset Tanah BUMN*, pelatihan aspek hukum asset tanah dan penyelesaian sengketa tanah pada BUMN, Bandung 2009.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/ Legal Reasoning)*, Jogjakarta: Gadjahmada University Press, 2005
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Murad, Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
- Mustofa dan Suratman, *Penggunaan Hak atas Tanah (Untuk Industri)*, Jakarta: Sinar Grafika, April 2013.
- Parlindungan, AP, *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- _____, *Komentar atas UUPA*, Bandung: Mandar Maju, 1993.

_____, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991

Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit Bhratara, 1996.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.

Ratna Juita, *Kedudukan dan Pengakuan Tanah Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional serta Penyelesaian Konflik Pertanahan*, seminar konflik pertanahan, 2013.

RB Agus Widjajanto, *Kapita Selekta BUMN dan Pendaftaran dan Permasalahan Tanahnya*, pelatihan aspek hukum asset tanah dan penyelesaian sengketa tanah pada BUMN di Bandung, 2009.

Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung: Alumni, 2006

Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, cetakan ke 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012

Sembiring, Jimmy Joses, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Visimedia, 2010.

Sihombing, Irene Eka, *Segi Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.

Sodiki, Ahmad, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.

Soedjendro, Kartini, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Soehino, *Ilmu Negara*, Jogjakarta: penerbit Liberty, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- _____ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- _____, *Hak Pengelolaan atas Tanah (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Jogjakarta: LaksBang Mediatama 2014.
- Soeromiharjo, Soedjarwo, *Mengkritisi Undang Undang Pokok Agraria, Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*, Cerdas Pustaka Publisher, 2010
- Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional*, Jogjakarta: Gadjahmada University Press, 1994.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Suandra, I Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sumardjono, Maria SW., *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Effendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, cetakan pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2010.
- Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2010.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Jogjakarta: UII Press, 2012.
- Thalib, Hambali, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2001.

Zein, Ramli, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Jakarta: Rineka Cipta, Maret 1995

II. Internet:

Albab Setiawan, Mafia Tanah mengancam BUMN, Kompas 5 Nov. 2014, budisanblog.blogspot.com/2014/11/mafia.tanah, 2014.

www.ahmadzakaria.net/blog/2014/12/13/koridor. Koridor hukum penjualan aset BUMN yang tidak produktif, 2013.

Ashrofi13.blogspot.com/2013/11/masalah.hak.pengeloaaan, Masalah hak pengelolaan dalam tanah nonaktif PT Kereta Api Indonesia (persero), 30 Nov 2013.

Arie V. Sendow, Masalah pemberian hak pengelolaan atas tanah Negara di Kabupaten Minahasa, Jurnal Hukum Unsrat vo. XXI/No. 04/April-Juni/2013 Edisi Khusus, www.ejournal.unsrat.ac.id, 2009

Arie Sukanti, Aspek hukum asset tanah BUMN dan penyelesaian sengketa tanah, disampaikan pada pelatihan “aspek hukum pengelolaan, pengendalian asset tanah BUMN dan penyelesaian masalahnya, 2009.

Dian Puji N. Simatupang, Hak Menguasai Negara dalam Keuangan Publik, 2007

Lilis Nur Faizah, Hak Menguasai Negara, suatu pendekatan Historis-Filosofis, Fak. Hukum UGM, 2007. <http://ml.scribd.com>

Pan Mohammad Fariz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Agung, www.jurnalhukum.blogspot.com.

Urip Santoso, Eksistensi Hak pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional, Mimbar hukum UGM volume 24, nomor 2, Juni 2012. www.mimbar.hukum.ugm.ac.id

Urip Santoso, Penyimpangan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, perspektif, volume XVIII No. 2 tahun 2013 edisi Mei, 2013. ejournal.uwks.ac.id/myfiles/

<http://srikuntjoro.wordpress.com/2010/04/sertipikat.ganda>, Sertipikat ganda, 2010.

III. Peraturan Perundang undangan:

Pasal 33 UUD 1945.

Undang Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan milik Belanda.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak pakai dan Hak pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya.

Peraturan Menteri Agraria No 1 tahun 1966 tentang Pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 13 tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan Perusahaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang Pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak hak atas tanah Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata cara permohonan dan penyelesaian bagian bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 jo PP Nomor 6 tahun 2006 (barang milik Negara).

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara penghapusan barang milik Negara.

Keputusan Kepala BPN No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.

Surat Menteri Negara Agraria/kepala BPN tanggal 12 Februari 1996 No. 500-468.

Surat Menteri BUMN No. S-79/M-MBU/2012 tanggal 12/12/12 tentang Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Aktiva Tetap.

Surat Edaran Menteri BUMN No. 09 tanggal 23 Mei 2008.

Surat Edaran Menteri BUMN No. 03 tanggal 23 Februari 2009.

Surat Edaran Menteri BUMN No. 09 tanggal 25 Mei 2009.

